

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya perhatian masyarakat maupun pemerintah di negara-negara saat ini terhadap peran perempuan dalam dunia politik semakin meningkat. Dimana perempuan diberikan kesempatan yang lebih luas lagi untuk direpresentasikan pada dunia politik yang selama ini dianggap terlalu laki-laki, karena memang dunia politik didominasi oleh kaum laki-laki. Perempuan hanya menempati prosentase yang sedikit, jauh dibawah jumlah representasi politik laki-laki.

Perempuan adalah kelompok mayoritas di dunia, tapi mengapa kelompok ini termarginalisasi secara politik, sosial, kultural, dan ekonomis serta jarang sekali ikut serta dalam pengambilan keputusan. Padahal akan menjadi lebih masuk akal (efektif) jika sebuah kebijakan yang menyangkut perempuan diolah dan diputuskan oleh perempuan, dan hal tersebut hanya mungkin jika perempuan memiliki keterwakilan dalam lembaga pembuat keputusan, sehingga segala kebijakan yang bersinggungan dengan perempuan berada di tangan ahlinya.

Australia adalah salah satu negara yang memberikan hak untuk memilih dalam pemilu sekaligus hak untuk dipilih dalam badan perwakilan bagi perempuan secara bersamaan. Hal tersebut dibuktikan dengan disahkannya *Commonwealth Franchise Act* oleh parlemen federal Australia tahun 1902<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> "Women in The Senate", Parliament of Australia Senate, Senate Brief No 3 September 1999  
www.aph.gov.au

Mensosialisasikan hak suara bagi perempuan adalah merupakan titik terang bagi peran serta perempuan dalam dunia politik, terutama dunia politik Australia.

Pada masa awal terbentuknya Negara Federasi Australia, perempuan telah bertekad agar dapat masuk kedalam parlemen federal. Peristiwa pertama kali dimana wanita dinominasikan untuk parlemen nasional adalah saat berdirinya The British Empire dimana terdapat tiga wanita yang dinominasikan untuk Senat dan satu untuk House of Representative. Ketiga kandidat Senat tersebut yaitu Vida Goldstein (feminis); Nellie Martel (penyair) dan Mary Ann Moore Bently (wartawan).

Terlepas dari fakta bahwa Australia adalah negara yang menghargai dan memberikan hak suara bagi perempuan, namun dalam prakteknya memakan waktu 41 tahun setelah disahkannya UU tersebut (*The Commonwealth Franchise Act*) sebelum wanita terpilih dalam pemilu federal. Mengingat permulaan yang menjanjikan ini, hal tersebut merupakan ironi atas keteringgalan ini, antara hak untuk dipilih dan tercapainya perwakilan perempuan dalam parlemen menjadikan Australia negara yang membutuhkan waktu terlama di dunia politik barat. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Table 1.1 Hak Politik Perempuan di Beberapa Parlemen Nasional di Dunia**

Negara	Hak Pilih	Hak Dipilih	Pertama Terpilih
New Zealand	1893	1919	1933
Australia	1902a/1962b	1902a/1962b	1943
Finland	1906	1906	1907
Norway	1907/1913	1907/1913	1936
Denmark	1915	1915	1918
United Kingdom	1918/1928	1918	1918
Germany	1918	1918	1919
Czechoslovakia	1918	1918	1920
Austria	1919	1919	1919
Canada	1919	1919	1921
Netherlands	1919	1917	1918

*Adapted from Sawyer and Simms, A Woman's Place: Women and Politics in Australia, 2nd edn, p. 16.*

- a. Perempuan di negara bagian South Australia dan Western Australia sudah memilih pada pemilu pertama tahun 1902.
- b. Perempuan Aborigin belum memiliki hak pilih sampai tahun 1962.

Salah satu alasan yang menarik mengapa representasi perempuan di parlemen federal membutuhkan waktu yang lama adalah karena pada masa itu di kebanyakan negara, sebelum PD II masyarakat masih sulit menerima perempuan yang bekerja di luar rumah. Pada saat itu perempuan yang bekerja di luar rumah adalah hanya yang terdesak kebutuhan finansial dalam rangka membiayai keluarganya, dan konsep *single women* belum populer saat itu. Perempuan yang menjadi pemimpin ataupun yang menonjol masih terbatas dibandingkan sekarang ini, karena masyarakat masih percaya bahwa jika perempuan ingin menjadi pemimpin maka hendaknya berpusat di dalam rumah. Sehingga ketika seorang

menjadi pemimpin ataupun yang menonjol masih terbatas dibandingkan sekarang ini, karena masyarakat masih percaya bahwa jika perempuan ingin menjadi pemimpin maka hendaknya berpusat di dalam rumah. Sehingga ketika seorang perempuan masuk keanggotaan dalam sebuah partai politik kondisi diatas ikut mempengaruhi persyaratan untuk mendapatkan dukungan dari partainya. Sedangkan dalam partai politik pria dianggap lebih memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah politik dibandingkan dengan perempuan. Tidak ada satu partai besarpun di Australia yang mendukung kandidat perempuan sebelum PD II, perempuan yang berhasil menjadi kandidat untuk senat maupun House of Representative dikarenakan hasil usaha yang dilakukan secara independen atau pencalonan kandidat perempuan tersebut adalah tiket bagi partai kecil dalam rangka mendapatkan suara.

Dalam *The Commonwealth Franchise Act 1902* pasal 6 tentang peraturan pemilu menyatakan bahwa hak suara atau hak memilih diberikan kepada setiap warga negara yang telah berusia minimal 21 tahun, dalam hal ini perempuan sudah mendapatkan hak suaranya sejak pemilu pertama Australia dilaksanakan. Namun masih terdapat diskriminasi karena pada pasal 4 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa ras kulit berwarna belum memiliki hak untuk memilih, kecuali jika dia diberikan hak suara di bawah hukum negara bagian. Perempuan dan demikian pula laki-laki suku Aborigin tidak mendapatkan hak suara sampai tahun 1962.

Pasca PD II terjadi perubahan sosial yang menyebabkan berkurangnya persepsi yang kaku tentang peran perempuan. Mulai saat itu perempuan mulai

menyadari bahwa mereka pun bisa melakukan “pekerjaan laki-laki” yang selama ini dianggap tidak mungkin dapat dikerjakan oleh perempuan, dan mereka telah menunggu bertahun-tahun agar mereka dapat menentukan dan menikmati pilihannya sendiri.

Tahun 1970an membawa perubahan yang menjanjikan bagi politik perempuan. Bersamaan dengan meningkatnya arus feminisme yang berimbas pada masyarakat politik di Australia. Terbentuknya Women’s Electoral Lobby yang mendorong partisipasi yang lebih aktif bagi politik perempuan.

Sepanjang tahun 1990an Women Into Politics mulai bereksplorasi melalui seminar dan pelatihan tentang bagaimana perempuan dapat mencapai kekuasaan politik. Berangkat dari kesimpulan bahwa terdapat banyak sekali diskriminasi terhadap perempuan dalam partai politik, menunjukkan bahwa budaya, struktur dan faktor kelemahan dalam politik Australia merupakan hal yang serius bagi partisipasi perempuan dalam politik dan bahwa hambatan terhadap kesetaraan partisipasi dalam kehidupan politik merupakan amanat lewat legislatif, struktural dan perubahan perilaku.<sup>2</sup>

Women Into Politics, sebuah koalisi dari organisasi-organisasi wanita dan individu-individu, telah mendesak partai politik untuk menggunakan prinsip-prinsip dan praktik kesetaraan kesempatan untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam parlemen Australia.

---

<sup>2</sup> Bielsky, Joan, *Political Equality for Women and The women’s Charter for Political Reform*  
<[www.wcc2002.asn.au/program/paper/joan\\_bielsky.doc](http://www.wcc2002.asn.au/program/paper/joan_bielsky.doc)>

Women Into Politics, menganggap bahwa keadilan, efisiensi dan kepentingan umum membutuhkan paling tidak representasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam badan pembuatan kebijakan.

Women Into Politics menganggap bahwa kesetaraan jumlah itu sendiri tidak akan dapat menjamin adanya perlakuan yang setara di dalam kebijakan publik dan hal tersebut akan tergantung pada kualitas dan tingkat kesadaran feminist dari perempuan yang terpilih.

Women Into Politics juga menganggap bahwa kita tidak dapat melanjutkan untuk terus memaksa lebih banyak wanita agar sadar politik kecuali dengan mencoba melakukan sesuatu terhadap faktor kelemahan dalam politik tersebut.

Perempuan membutuhkan wakil perempuan di parlemen, tidak hanya untuk mewakili sebuah elektorat khusus tetapi wakil yang mampu untuk mewakili perempuan, dimana anggota parlemen perempuan tersebut peduli terhadap pola hidup, gaya hidup dan status sosio-ekonomi perempuan. Anggota parlemen perempuan akan menyuarakan hak-hak perempuan, kesejahteraan dan menempatkan perempuan dalam agenda politik partainya.

Perempuan perlu perwakilan mereka di parlemen dapat berbicara berdasarkan pengalamannya tentang dampak dari pembuatan undang-undang dan program-program terhadap perempuan sama seperti dampaknya terhadap petani, usaha kecil dan kelompok lain.

Anggota parlemen taat pada filosofi dari sebuah partai politik, hadir dengan pertimbangan yang matang bagi parlemen dan pengalaman dunia

kepartaian yang berbeda-beda serta wilayah keahlian yang berbeda pula. Norma dalam kehidupan politik di Australia telah berlangsung sebagai pengalaman hidup, gaya hidup, dan keahlian kaum laki-laki serta bahwa laki-laki yang berkuasa dianggap baik dan cocok bagi perempuan.

Banyak dari pelopor anggota parlemen perempuan di Australia dari kedua partai besar adalah feminis dan mendukung perempuan. Kebanyakan dari anggota parlemen perempuan sekarang, dengan beberapa pengecualian, mereka terlihat sebagai loyalis partai, tidak ada bedanya dengan pendahulunya yang laki-laki, mereka menjalankan keinginan partainya. Anggota parlemen perempuan adalah pewaris revolusi feminis dan perwakilan feminis tapi tampaknya banyak yang tidak mau mengambil resiko menjadi perwakilan publik bagi perempuan ataupun berbicara dengan gerakan perempuan.

Adalah tidak tepat jika dikatakan bahwa dampak dari kebijakan, program dan pembuatan undang-undang terhadap perempuan akan sama saja dengan laki-laki. Banyak kebijakan dan program pemerintah yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan kaum perempuan serta pola kehidupan perempuan yang berbeda, mereka tetap saja tidak setara dalam status ekonomi, peran mereka terhadap perlindungan anak-anak dan orang lanjut usia dan sebagai kontributor dalam dunia kerja. Pendeknya kebijakan seringkali dibuat terhadap masalah yang mempengaruhi perempuan tanpa input yang efektif dari perempuan.

Sejak tahun 1992 sampai sekarang jumlah anggota parlemen perempuan di Australia hanya meningkat dari 10 % menjadi kira-kira 25%. Hal tersebut

kepartaian yang berbeda-beda serta wilayah keahlian yang berbeda pula. Norma dalam kehidupan politik di Australia telah berlangsung sebagai pengalaman hidup, gaya hidup, dan keahlian kaum laki-laki serta bahwa laki-laki yang berkuasa dianggap baik dan cocok bagi perempuan.

Banyak dari pelopor anggota parlemen perempuan di Australia dari kedua partai besar adalah feminis dan mendukung perempuan. Kebanyakan dari anggota parlemen perempuan sekarang, dengan beberapa pengecualian, mereka terlihat sebagai loyalis partai, tidak ada bedanya dengan pendahulunya yang laki-laki, mereka menjalankan keinginan partainya. Anggota parlemen perempuan adalah pewaris revolusi feminis dan perwakilan feminis tapi tampaknya banyak yang tidak mau mengambil resiko menjadi perwakilan publik bagi perempuan ataupun berbicara dengan gerakan perempuan.

Adalah tidak tepat jika dikatakan bahwa dampak dari kebijakan, program dan pembuatan undang-undang terhadap perempuan akan sama saja dengan laki-laki. Banyak kebijakan dan program pemerintah yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan kaum perempuan serta pola kehidupan perempuan yang berbeda, mereka tetap saja tidak setara dalam status ekonomi, peran mereka terhadap perlindungan anak-anak dan orang lanjut usia dan sebagai kontributor dalam dunia kerja. Pendeknya kebijakan seringkali dibuat terhadap masalah yang mempengaruhi perempuan tanpa input yang efektif dari perempuan.

Sejak tahun 1992 sampai sekarang jumlah anggota parlemen perempuan di Australia hanya meningkat dari 10 % menjadi kira-kira 25%. Hal tersebut



menggambarkan bahwa perempuan kurang berminat dalam mengejar karir politik, ataupun disebabkan oleh adanya hambatan yang besar bagi partisipasi politik kaum perempuan. jumlah tersebut dirasa kurang bagi perempuan untuk secara efektif mempengaruhi kebijakan publik.<sup>3</sup>

Meningkatnya keterwakilan perempuan yang berjalan sangat lambat di Australia berkaitan dengan adanya kenyataan bahwa hanya ada satu partai politik besar yang berkomitmen untuk menjaga proporsi minimum bagi kandidat perempuannya. Hal tersebut sangat mengherankan karena Australia adalah negara yang maju dan demikian pula mengagungkan demokrasi. Pada Februari 2002 keterwakilan perempuan dalam struktur politik secara global sebanyak 14,5% di majelis rendah parlemen dan 13,6% senator perempuan.<sup>4</sup>

Pemerintah Australia sendiri sepakat bahwa tingkat keterwakilam perempuan ini harus ditingkatkan, lebih karena perempuan dianggap pantas dari sudut pandang kesetaraan dan perempuan lebih bisa mewakili dan membela kepentingan perempuan sendiri daripada laki-laki, serta masyarakat kekurangan peran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Namun demikian, meningkatnya jumlah representasi politik perempuan dalam parlemen merupakan suatu pencapaian besar yang membanggakan setelah melewati perjuangan yang panjang. Berikut adalah data perempuan dalam parlemen Australia pada April 2003:

---

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> www.ipu.org "Perempuan di Parlemen"

**Tabel 1.2 Perempuan di Parlemen Australia**

<b>Parlemen Federal</b>	<b>Anggota Perempuan</b>	<b>Anggota Laki-laki</b>	<b>Prosentase Perempuan</b>
House of Representatives	38	112	25.3%
Senate	22	54	28.9%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>166</b>	<b>26.5%</b>
<b>Parlemen Negara Bagian</b>			
New South Wales	23	70	24.7%
Queensland	33	56	37.1%
South Australia	16	31	34%
Tasmania	6	19	24%
Victoria	27	61	30.7%
Western Australia	13	44	22.8%
Australian Capital Territory	7	10	41.2%
Northern Territory	7	18	28%
<b>Total</b>	<b>132</b>	<b>308</b>	<b>30%</b>

*Source: Information about members obtained from the Parliamentary website for each State and Territory*

Berdasarkan tabel diatas representasi perempuan lebih banyak di dalam senat atau majelis tinggi dibandingkan dalam house of representative atau majelis rendah. Hal tersebut dikarenakan para senator di Australia dipilih menggunakan sistem proporsional yang ternyata membawa dampak positif dalam meningkatkan jumlah representasi anggota parlemen perempuan di seluruh dunia. Saat ini jumlah senator perempuan adalah 22 dari total 76 senator (28,9%) di Australia. Indikator meningkatnya jumlah representasi politik perempuan ditunjukkan juga dengan meningkatnya jumlah menteri perempuan, sampai saat ini ada empat perempuan dari total 30 menteri.

Disamping meningkatnya jumlah perempuan di parlemen, tetap saja masih ada penghalang bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasinya dikarenakan oleh masalah tidak adanya kesamaan kesempatan yang diberikan pada perempuan di lingkungannya yang mempengaruhi kemampuan perempuan untuk masuk ke dalam parlemen.

Lebih dari seratus tahun setelah terbentuknya federasi tidak semua aspirasi dari para suffragists terealisasi. Perempuan telah mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan telah masuk dalam pemerintahan, melewati berbagai rintangan. Mereka tidak hanya sukses membawa perubahan dalam politik, perempuan juga dianggap akan memurnikan pengaruh dalam kehidupan publik dan menciptakan tatanan dunia baru.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah “Bagaimana upaya perempuan Australian Labor Party untuk meningkatkan representasi politiknya di Parlemen Australia?”

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk membantu menjelaskan pokok permasalahan diatas, maka penulis menggunakan kerangka pemikiran yang diharapkan bisa memberikan gambaran tentang fenomena yang penulis kemukakan di depan. Adapun kerangka pemikiran yang penulis gunakan adalah :

## 1. Kuota

Kuota dalam politik adalah penetapan sebuah prosentase ataupun jumlah perwakilan atau representasi dari suatu kelompok tertentu, dan yang dimaksud disini adalah prosentase representasi perempuan, seringkali digunakan dalam penetapan prosentase representasi minimum, misalnya 20, 30 ataupun 40 persen. Kuota digunakan sebagai sebuah tolak ukur untuk meningkatkan representasi dari kelompok dengan representasi rendah ataupun yang secara historis tidak memiliki perwakilan dalam politik. Kuota gender dirancang sebagai kebutuhan akan sebuah representasi minimum bagi perempuan ataupun menggambarkan sebuah representasi maksimum atau minimum dari dua jenis kelamin, seperti misalnya tidak ada lagi pengaturan yang lebih dari 60 persen ataupun kurang dari 40 persen bagi tiap jenis kelamin. Syarat ataupun ketentuan dirancang untuk mencapai jumlah maksimum bagi kedua jenis kelamin, artinya kuota sebenarnya tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan.<sup>5</sup>

Perbedaannya seharusnya berada antara regulasi yang bertujuan merubah komposisi dari 1) kelompok kandidat potensial yang selanjutnya disebut sebagai calon (aspirant), 2) kandidat yang mengikuti pemilu, dan 3) dan kandidat yang terpilih. Kuota bisa diartikan sebagai regulasi jika dalam pemilu membutuhkan jumlah minimum atau prosentase dari kelompok tertentu pada salah satu dari ketiga level tersebut.

---

<sup>5</sup> Dahlerup, Drude, *Women Quotas and Politics*,  
<[www.abc.net.au](http://www.abc.net.au)>

Kebanyakan sistem kuota menitikberatkan pada level yang kedua, pencapaian terpenuhinya syarat bagi representasi minimum dari kelompok tertentu dalam pemungutan suara (kuota kandidat). Kuota dalam bentuk "reserve seats" (jumlah kursi yang sudah ditetapkan) berlangsung pada level ketiga. Disini suatu kelompok dijamin beberapa jumlah kursi diantara yang terpilih (kuota *reserve seats*). Kata '*electoral gender quotas*' digunakan untuk menggambarkan sistem kuota yang dirancang dalam rangka menjalankan proses-proses dalam pemilihan umum.

Kuota bisa juga diatur melalui konstitusi sebuah negara atau lewat peraturan, biasanya di dalam peraturan pemilu. Dalam hal ini kita membicarakan kuota legal. Kuota legal mengatur cara kerja semua partai politik di suatu negara, dan juga dapat memberikan sanksi jika kuota tidak terpenuhi. Meskipun demikian, kuota biasanya dijalankan secara sukarela oleh satu atau lebih partai politik di suatu negara, disebut kuota partai.

Bisa jadi beberapa partai politik menggunakan kuota, sementara yang lainnya dalam satu negara yang sama menolak ide kuota tersebut, seperti yang terjadi di Australia dimana Partai Buruh Australia (*Australian Labor Party*) mengadopsi kuota untuk meningkatkan jumlah representasi perempuan di parlemen, namun Koalisi Partai Liberal-Nasional menolak untuk menggunakannya dan lebih memilih memberikan jatah kursinya pada perempuan yang betul-betul memiliki kemampuan. Ketika kuota legal sudah ditetapkan, kuota partai hanyalah soal kepentingan partai saja, jika suatu partai secara sukarela memutuskan untuk memberikan

prosentase yang lebih tinggi dari prosentase yang telah ditetapkan, atau jika suatu partai menggunakan aturan-aturan khusus lainnya

**Table 1.3 Tipe Kuota Pemilihan**

<b>Diberikan melalui</b>	<b>Aspirants</b>	<b>Kandidat</b>	<b>Dipilih</b>
<b>Kuota legal (konstitusional atau undang-undang pemilu)</b>	n/a	Kuota kandidat	<i>Reserved seats</i>
<b>Kuota sukarela oleh partai</b>	<b>Kuota Aspirant (Short lists)</b>	Kuota kandidat	<i>Reserved seats</i>

Hubungan antara tingkat kuota dan penerapannya tidaklah jelas. Kuota untuk meningkatkan suara dalam seleksi kandidat (level pertama) biasanya diputuskan oleh partai itu sendiri, kuota kandidat untuk urutan kandidat dari suatu partai pada pemilu (level kedua) bisa diterapkan baik dari partai itu sendiri (kuota partai) ataupun diatur lewat konstitusi atau peraturan (legal kuota). Kuota pada level ketiga yaitu reserved seats (jumlah kursi yang sudah ditetapkan) biasanya merupakan sistem kuota legal, dimana kuota diberikan melalui konstitusi atau lewat peraturan pemilu, surat keputusan dari partai yang berkuasa dalam negara yang menganut sistem partai tunggal atau diberikan oleh penguasa kerajaan. Selain itu, banyak partai atau bahkan pemerintah menjalankan sesuai target yang telah ditentukan dan direkomendasikan saja (seringkali disebut 'soft quota'). Sistem kuota pada ketiga level dan penerapannya yang

berbeda-beda, bisa juga digunakan dalam menitikberatkan seleksi dari kelompok-kelompok etnik yang berbeda, kasta, klan dan kelompok religius untuk menduduki jabatan politik. Tapi lebih dari itu semua sistem pemilu memang menganut banyak jenis kuota, meskipun biasanya menggunakan label yang berbeda-beda, seperti ketika suatu wilayah berpenduduk padat diberi jumlah kursi yang tidak proporsional di parlemen atau ketika distrik pemilihan dibentuk untuk menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu.

## **2. Kelompok Penekan (Pressure Group)**

Yang dimaksud dengan kelompok penekan adalah setiap asosiasi yang membuat tuntutan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada pemerintah dalam rangka mempengaruhi pembuatan atau pelaksanaan kebijakan publik, tanpa ia sendiri harus mempunyai kekuasaan formal untuk memerintah. Hal tersebutlah yang membedakannya dengan partai politik. Partai politik berusaha memenangkan kekuasaan pemerintahan bagi kepentingannya dan mengendalikan berbagai kebijakan publik. Kelompok penekan, sebaliknya, bertindak mempengaruhi pemerintah (serta oposisi) mengenai beberapa isu tertentu, tetapi tidak untuk memegang kekuasaan untuk mereka sendiri<sup>6</sup>.

Kelompok penekan sangat sadar terhadap peran mereka untuk memajukan kepentingan-kepentingan kelompok yang diwakilinya, dan

---

<sup>6</sup> Hamid, Zulkifli, "Sistem Politik Australia", PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hal 297-300

karenanya mereka selalu melibatkan diri ke dalam politik dengan tujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Pada umumnya kelompok penekan melakukan berbagai aktivitas dan taktik politik, dari yang bersifat konvensional sampai non-konvensional untuk mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki.

Kelompok penekan di Australia dapat dibedakan atas dua kelompok besar. Jenis pertama adalah kelompok yang bersifat *sectional*. Kelompok ini mewakili salah satu golongan dan atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam masyarakat, seperti golongan buruh, pengusaha, petani, agama, perempuan dan lain-lain. Jenis kelompok ini dapat bertahan lama sepanjang kebutuhan kelompok yang diwakilinya terpenuhi. Jenis kedua adalah yang bersifat *promosional*. Kelompok jenis ini tidak mewakili salah satu golongan tertentu dalam masyarakat. Kelompok ini terbentuk hanya untuk memajukan dan memperjuangkan satu isu tertentu, seperti kelompok-kelompok yang memperjuangkan masalah lingkungan, binatang dan lain-lain.

#### **D. Jangkauan**

Untuk lebih mempermudah pembahasan maka penulis membatasi ruang lingkungannya yaitu representasi politik perempuan dalam parlemen Australia dengan jangka waktu tahun 1972 hingga tahun 2005, dengan judul “ Representasi Politik Perempuan Partai Buruh Australia di Parlemen Australia”



### **E. Hipotesa**

Upaya perempuan Australian Labor Party untuk meningkatkan representasi politik di parlemen Australia adalah dengan melalui pengembangan program partai yaitu melalui penetapan kuota dan pemberian dukungan melalui Emily's List.

### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan penulis akan kajian tentang representasi politik perempuan, khususnya perempuan anggota Partai Buruh Australia (*Australian Labor Party*), di parlemen terutama yang terjadi di Australia

### **G. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan Studi Pustaka (*Library Research*) yang meliputi data-data yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, majalah dan juga internet serta literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penulisan skripsi ini.

Melalui metode deduktif yang berdasarkan pada kerangka dasar teori kemudian ditarik sebuah hipotesis yang digunakan melalui data empiris, diharapkan dengan proses tersebut, penelitian ini dapat memperoleh data yang cukup untuk mengemukakan "Representasi Politik Perempuan Australian Labor Party di Parlemen Australia"

## H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan                      Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Jangkauan Penelitian, Hipotesa, Tujuan Penelitian, dan Metode Pengumpulan Data.

BAB II Keterlibatan Perempuan di Parlemen Australia                      meliputi Sejarah Perkembangan Perempuan dalam bidang politik di Australia. Dan kendala-kendala yang dihadapi perempuan untuk masuk dalam parlemen

BAB III. Sistem Pemilihan Umum Australia                      meliputi sistem yang dianut dalam pemilihan wakil-wakil untuk *House of Representative* dan Senat

BAB IV. Upaya Perempuan dalam Australian Labor Party                      meliputi upaya-upaya yang dilakukan ALP anggota perempuan di dalamnya untuk meningkatkan representasi politik perempuan di parlemen

BAB V Kesimpulan